

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali , Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Abdul R., 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta Djumadi, 2005, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Friedman, Lawrence M., 2015, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Terj. M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- HS, H Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1998, *Kebebasan Berserikat*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- _____, 1999, *Gerakan Serikat Pekerja (Trade Unionism) Studi Kasus Indonesia dan Negara-Negara Industri*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- _____, 1999, *Hubungan Industrial : Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koeshartono, D. dan M.F. Shellyana Junaedi, 2005, *Hubungan Industrial Kajian Konsep & Permasalahan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Nazir, 2002, *Metode Penelitian*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sridadi, Ahmad Rizky, 2016, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama : Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia*, Empat Dua Media, Malang.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syafa'at, Rachmad, 2008, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya : Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi*, In-TRANS Publishing, Malang.
- Wijayanti, Asri, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi

Baringin Pantas M.S., 2017, “Tinjauan Yuridis Pemberangusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Union Busting) : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 879/Pid.B/2010/Pn.Bgl”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok.

C. Jurnal

Hernawan, Ari dan Murti Pramuwardhani Dewi, “Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Yustisia Jurnal Hukum*”, Volume 86, Nomor 6, Mei-Agustus 2013.

Zulkarnain Ibrahim, “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Desember 2016.

D. Internet

Priyanto, Bambang, “Pemberangusan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh”, <http://faktapost.com/read-2698--mencermati-apa-itu-union-busting.html>, 28 Desember 2017.

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/union-busting>, 28 Desember 2017.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39).

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 743).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 64).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 98).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

F. Konvensi Internasional

Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama